

ORIENTASI EKONOMI ISLAM DALAM ARUS TREND EKONOMI ERA GLOBAL DI TENGAH KEGAGALAN EKONOMI KAPITALISME

Muwahid Shulhan

STAIN Tulungagung, Jl. Mayor Sujadi Timur No. 46
Tulungagung
email: acimapublishingyahoo.co.id

Abstract: *The conventional economic approach that was excessive to fulfill personal interest in Islamic countries has increased economic growth in the economy in western world. But behind this success, in fact they failed to actualize the social vision and normative purpose for creating economic science. In the next, it appeared a negative effect that was same as Fukuyama said "the Great Disruption". For solving those difficulty problems faced by muslim countries must be started in making and realizing a Paradigm. A paradigm is a basic for answering all of the problems above. In that paradigm, there must be planted a new premis, in developing of the economic in Islamic rules and the literature of islamic economic building is based on the paradigm as in al-Qur'an and as-Sunah. al-Qur'an and al-Sunnah are the main point of our basic reference. The second premis of this methode refuses the imitative. The kapitalisme, socialisme and that derivation are not the ideal type, even we can collect another advantages sources for being adopted and integrated in islamic paradigm without reducing any rules.*

المخلص: كان المدخل الاقتصادي التقليدي لتلبية حواتج الأشخاص خاصة في البلدان الإسلامية يؤدي إلى ارتفاع الاقتصاد في البلدان العربية. ولكن وراء هذا النجاح، هناك فشل في إيجاد الآمال من المجتمع والأغراض الأساسية من ظهور علم الاقتصاد. وهذه الأمور تؤثر أثرا سلبيا كما أشار إليه فوكويما بقوله: "هناك آفات كبرى من ظهور الاقتصاد المادّي". ولحلّ المشكلات التي تواجه البلاد الإسلامية، يجب البدء من وضع الأساس المتين لفروض الأفكار عن الاقتصادية المعيّنة. وهذه هي مرجع لحلّ جميع المشكلات السابقة. وفي تلك الأفكار أمثال جديدة التي تشرح على أنّ الاقتصاد الإسلاميّ، أولا: أن يعتمد على القرآن والسنة النبويّة، لأنّهما مصدران لجميع الأحكام الإسلاميّة. وثانيا: من هذا المدخل هو المنع على الآراء المادّيّة، لأنّها غير مناسبة

لأشكال الاقتصاد الذائق. ولكن يجب علينا أن نجمع بينهما أي من كل المصادر النافعة لتكميل الفكرة الإسلامية دون أن نقص الأفكار الموحوة من قبل.

Abstrak: Pendekatan ekonomi konvensional yang berlebihan terhadap pemenuhan kepentingan pribadi (*self interest*) di Negara-negara Islam, memangtelahmeningkatkanpertumbuhanekonomidalamperekonomian di dunia Barat. Tetapi di balik keberhasilan ini, sesungguhnya mereka gagal mewujudkan aktualisasi visi sosial dan tujuan normatif lahirnya ilmu ekonomi. Hal itu kemudian juga menimbulkan efek negatif dalam bentuk yang diistilahkan oleh Fukuyama “kekacauan yang besar (*the great disruption*)”. Untuk mengurai persoalan pelik yang dihadapi negeri-negeri muslim tersebut harus dimulai dengan peletakan kerangka berpikir. Kerangka berpikir menjadi basis untuk menjawab persoalan-persoalan diatas. Dalam kerangka berpikir tersebut harus dicanangkan sebuah premis baru bahwa pembangunan ekonomi dalam kerangka ajaran Islam dan ilmu ekonomi pembangunan Islami berakar pada kerangka nilai yang ada dalam al-Qur’an dan al-Sunah. al-Qur’an dan al-Sunah merupakan titik rujukan kita yang paling mendasar. Premis kedua dalam pendekatan ini menolak sikap imitatif. Model kapitalis maupun sosialis serta derivasinya bukan merupakan ideal type, kendatipun kita juga dapat mengumpulkan sumber-sumber yang bermanfaat untuk diadaptasikan atau diintegrasikan dalam kerangka Islam tanpa harus mengurangi nilai-nilai normatif yang ada.

Keywords: kapitalisme, era global, ekonomi Islam, paradigm baru

PENDAHULUAN

Memperhatikan keadaan ekonomi umat Islam tidak ubahnya seperti melihat sebuah lautan. Posisi ekonomi umat Islam dalam peta besar perekonomian ibarat riak-riak kecil di tepi pantai menghadapi gelombang besar di tengah samudera. Riak-riak kecil itu tetap ada namun senantiasa di pinggiran, tidak pernah mampu ke tengah. Secara ekonomi, umat Islam tetap eksis, namun mereka senantiasa berposisi pinggiran (*peripheral*). Tidak pernah berhasil menonjol ke tengah, karena setiap kembali dihempas kembali ke tepian oleh gelombang besar yang datang dari tengah samudera.

Posisi ekonomi umat Islam bagaikan arus kecil di dasar laut, yang di atasnya merajalela badai besar. Tidak pernah mencuat ke atas atau ke permukaan. Setiap kali ditenggelamkan ke dasar oleh badai yang menggulung di atasnya. Begitulah kira-kira ‘nasib’ ekonomi umat Islam dewasa ini. Tidak saja dalam peta perekonomian sejangat, tapi juga dalam peta perekonomian di tanah air. Dengan mudah dapat disaksikan, sekaligus dirasakan, betapa umat Islam—yang merupakan mayoritas penduduk negeri ini—pada umumnya secara ekonomi berada pada posisi yang memprihatinkan. Atau dalam istilah yang lebih halus: tingkat kekayaan umat Islam tergolong rendah.

Umat Islam merupakan penduduk mayoritas di negeri ini. Oleh karenanya, buruknya potret perekonomian sebagian besar masyarakat pada dasarnya mencerminkan buruknya kondisi ekonomi umat Islam. Ada tiga indikator kondisi ekonomi rakyat yang biasa digunakan, yakni kemiskinan, pengangguran dan ketimpangan sosial. Hingga saat ini, angka kemiskinan dan ketimpangan pendapatan penduduk masih sangat tinggi. Jika menggunakan standar Biro Pusat Statistik (BPS) tahun 2009, yakni batas pengeluaran Rp 200.262 per kapita per bulan, maka jumlah orang miskin sebanyak 32,53 juta atau 14,15 persen (Maret, 2009).¹ Batasan kemiskinan tersebut tentu masih di bawah kriteria kemiskinan dalam Islam dimana seseorang dianggap tidak miskin jika ia telah memiliki makanan, pakaian dan tempat tinggal, sementara pendidikan, kesehatan, air dan listrik menjadi tanggung jawab negara untuk menjaminkannya. Sementara batas pengeluaran BPS bagi orang miskin tersebut tidak menekankan apakah pakaian, makanan dan tempat tinggal yang dimiliki layak dan juga pengeluaran tersebut termasuk untuk pendidikan, kesehatan, air, listrik, yang saat ini hampir semua harus dibeli.

Kekacauan ekonomi juga terjadi secara global akibat “globalisasi ekonomi” yang tidak adil. Globalisasi ekonomi yang tidak adil, berdampak ‘hanya’ menguntungkan perusahaan multinasional (*Multi National Corporations/MNCs*). Globalisasi sebagian besar merupakan cerita bagaimana perusahaan multinasional mengambil alih peran negara dalam menentukan jalannya perekonomian dunia. Globalisasi ekonomi dan berbagai peraturan birokrasi global telah membuat korporasi-korporasi multinasional mampu bergabung menjadi satu,

1 Badan Pusat Statistik Indonesia, *Indonesia dalam Angka 2009* (Jakarta: Lembaga BPS, 2009), 125.

menyuarakan satu kepentingan. Sebanyak 200 korporasi besar papan atas dunia menguasai 28 persen aktivitas perekonomian global. Sementara itu, 500 korporasi papan atas memegang 70 persen perdagangan dunia, dan 1000 korporasi papan atas mengontrol lebih dari 80 persen hasil industri dunia.² Hal ini memang diharapkan dan sejalan dengan visi dari sistem kapitalis yang berparadigma pasar (*market mechanism paradigm*), yang menyerahkan jalannya ekonomi sepenuhnya kepada pasar. Pemerintah hanya akan turut campur ketika pasar diganggu oleh interupsi luar (*externalities*) atau kegagalan pasar (*market failures*). Padahal *externalities* atau *market failures* sangat bias standarnya. Globalisasi dianggap memberikan efek efisien kepada proses perdagangan dunia, meski sesungguhnya hanya menguntungkan kapitalis global sebagai pemilik MNCs. Dampaknya adalah penghisapan atau akumulasi kekayaan hanya untuk segelintir orang dan meninggalkan kemiskinan yang meluas. Banyaknya busung lapar yang terkuak akhir-akhir ini merupakan fakta kongkrit.³

UMAT ISLAM DAN PERMASALAHANNYA

Masalah kemiskinan merupakan salah satu persoalan mendasar yang menjadi pusat perhatian pemerintah di negara manapun, termasuk di Indonesia. Dan biasanya, untuk mengukur efektivitas upaya pengentasan kemiskinan, selalu dikaitkan dengan kinerja pertumbuhan ekonomi. Kinerja pertumbuhan ekonomi Indonesia yang cukup mengesankan senantiasa akan dikaitkan tingkat kemiskinan yang dialami Indonesia. Terutama sekali, bagaimana keterkaitan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang cukup tinggi tersebut dalam menurunkan tingkat kemiskinan di Indonesia. Sebagaimana kita ketahui, dalam lima tahun terakhir ini, kinerja pertumbuhan ekonomi Indonesia cukup mengesankan. Di tengah krisis ekonomi yang menimpa perekonomian dunia, perekonomian Indonesia tetap mampu tumbuh positif dengan tingkat pertumbuhan yang cukup tinggi. Selama tahun 2006-2010, ekonomi Indonesia secara berturut-turut tumbuh sebesar, 5,5% (2006), 6,2% (2007), 6,0% (2008), 4,5% (2009), dan sebesar 6,1% (2010).

2 The United Nations Human Development Report, *Does Globalization Help The Poor?* terj. Widyasmara dan AB Widyanta (Yogyakarta: Cindelas Pustaka Rakyat Cerdas, 2003), 29.

3 M. Umar Chapra, *The Future of Economics: an Islamic Perspective*, terj. Danah Zohar dan Ian Marshal (Jakarta: SEBI, 2001), 45.

Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat kemiskinan juga terus mengalami penurunan dalam kurun waktu 5 tahun terakhir. Selama tahun 2006-2010, tingkat kemiskinan secara berturut-turut sebesar 17,8% (2006), 16,6% (2007), 15,4% (2008), 14,2% (2009), dan 13,3% (2010).⁴

Bahkan, karena indikator IPM pada hakekatnya merujuk pada konsep *basic human capabilities*, dapat dikatakan bahwa kemampuan masyarakat Indonesia untuk memenuhi kebutuhan yang sangat mendasar saja ternyata masih ketar-ketir. Dengan kata lain, alih-alih hidup berkecukupan, masyarakat Indonesia masih belum bisa terbebas dari lilitan kemiskinan. Hingga saat ini, jumlah orang miskin di Indonesia masih sangat mencemaskan.⁵ Pada tahun 2007, jumlah penduduk miskin adalah 37,17 juta orang atau 16,58% dari total penduduk Indonesia. Satu tahun sebelumnya, jumlah penduduk miskin Indonesia sebanyak 39,30 juta atau sebesar 17,75% dari total jumlah penduduk Indonesia tahun tersebut (TKPK, 2007). Ini berarti jumlah orang miskin turun sebesar 2,13 juta jiwa. Meskipun terjadi penurunan, secara absolut angka ini tetap saja besar dan melampaui keseluruhan jumlah penduduk Selandia Baru (4 juta), Australia (12 juta), dan Malaysia (25 juta). Angka kemiskinan ini menggunakan *poverty line* dari BPS sekitar Rp.5.500 per kapita per hari.

Sampai saat ini masih ada *public image* bahwa *Islamic learning* identik dengan kejumudan, kemandegan serta kemunduran. Kesan ini didasarkan pada kenyataan bahwa dewasa ini mayoritas umat Islam hidup di negara-negara dunia ketiga dalam serba keterbelakangan ekonomi dan pendidikan. Akibat pemahaman semacam ini, penjajahan Barat atas Timur semakin menguat. Dominasi Barat dalam pelbagai hal seperti sains dan teknologi modern, informasi, ekonomi dan kultur makin menyisihkan umat Islam yang berada dalam ke-dalaman *inferior complex*. Umat Islam tidak hanya didikte oleh hegemoni Barat, tapi lebih parah lagi mereka kehilangan jati diri dan penghargaan diri (*self-identity and self-esteem*), sebagai akibat dari kemunduran ekonomi, politik, pendidikan dan kebudayaan yang berkepanjangan. Konsekuensi logis dari situasi ini adalah proses

4 Badan Pusat Statistik Indonesia, *Indonesia dalam Angka 2009* (Jakarta: Lembaga BPS, 2009), 122.

5 Edi Suharto, *Analisis Kebijakan Publik: Panduan Praktis Mengkaji Masalah dan Kebijakan Sosial*, Cet. Ke-3 (Bandung: Alfabeta, 2005). 67

marginalisasi umat Islam semakin menjadi-jadi (*the marginalization of Islamic world continues*).⁶

Lahirnya ide yang masih diperdebatkan tentang Islamisasi pengetahuan yang pada awalnya dilancarkan oleh Ismail Faruqi (*Temple University AS*) sejak tahun 1970-an, pada dasarnya dimotivasi oleh kenyataan kemunduran ini dan kerinduan akan revitalisasi potensi umat Islam sebagaimana yang terjadi di masa silam. Konkritnya krisis tersebut disebabkan oleh:

1. *The backwardness of the Ummah* (kemunduran umat)
2. *The weakness of the Ummah* (kelemahan umat)
3. *The intellectual stagnation of the Ummah* (stagnasi pemikiran umat)
4. *The absence of ijtihad in the Ummah* (absennya ijtihad umat)
5. *The absence of cultural progress in the Ummah* (absennya kemajuan kultural umat)⁷
6. *The Ummah's losing touch with the basic norms of Islamic civilization.* (tercabutnya umat dari norma-norma dasar peradaban Islam).

Poin-poin di atas pada dasarnya menunjukkan krisis intelektual dalam dunia Islam yang berlarut-larut. Tidak diragukan lagi bahwa krisis adalah penyebab sekaligus bukti dekadensi dan melempemnya umat, yang sekaligus menghambat mereka untuk mengejar keteringgalan kultural dan peradaban dunia modern. Kelesuan ini bahkan sering diperburuk dengan krisis politik, ekonomi, dan militer.

TREND PERKEMBANGAN EKONOMI GLOBAL

Era globalisasi (*the age of globalization*), dalam beberapa literatur dinyatakan bermula pada dekade 1990-an.⁸ Era ini ditandai diantaranya dengan adanya fenomena penting dalam bidang ekonomi. Kegiatan ekonomi dunia tidak hanya dibatasi oleh faktor batas geografi,

6 Abdul Hamid Abu Sulayman, "Islamization of Knowledge with Special Reference to Political Science," *American Journal of Islamic social Sciences*, Vol. 2 (ed) (Nort America: Association of muslim scientis, 1985), 263.

7 Bayard Dodge, "The Subjects and Titles of Book Written During the First Four Centuries of Islam." *Islamic Culture* (Oktober, 1954), 540.

8 S. Parvez Manzoor, "Islam in the Era of Globalization: Muslim Attitudes Towards Modernity and Identity" oleh Johan Meuleman (ed.). 2002. London: RoutledgeCurzon, dimuat dalam *Journal of Islamic Studies*, Vol. 15, No. 2, Mei 2004 (Oxford: Oxford Centre for Islamic Studies), 280.

bahasa, budaya dan ideologi, akan tetapi lebih karena faktor saling membutuhkan dan saling bergantung satu sama lain.⁹ Dunia menjadi seakan-akan tidak ada batas, terutama karena perkembangan teknologi informasi yang begitu pesat. Keadaan yang demikian melahirkan banyak peluang sekaligus tantangan,¹⁰ utamanya dalam upaya pengembangan ekonomi Islam.¹¹

Proses globalisasi diperkirakan semakin bertambah cepat pada masa mendatang, sebagaimana dikemukakan oleh Colin Rose bahwa dunia sedang berubah dengan kecepatan langkah yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kehidupan masyarakat, termasuk kehidupan hukum dan ekonominya, menjadi semakin kompleks.¹² Pada dasarnya, sistem ekonomi menunjuk pada satu kesatuan mekanisme dan lembaga pengambilan keputusan yang mengimplementasikan keputusan tersebut terhadap produksi, konsumsi dan distribusi pendapatan.¹³

Pada era global ini, terdapat berbagai macam sistem ekonomi negara-negara di dunia. Meskipun demikian, secara garis besar, sistem ekonomi dapat dikelompokkan pada dua kutub, yaitu kapitalisme dan sosialisme. Sistem-sistem yang lain, seperti *welfare state*, *state capitalism*, *market socialisme*, *democratic socialism*, pada dasarnya bekerja pada bingkai kapitalisme dan sosialisme. Akan tetapi, sejak runtuhnya Uni Soviet, sistem sosialisme dianggap telah tumbang bersama runtuhnya Uni Soviet tersebut. Oleh karena itu, sistem ekonomi kapitalismelah yang hingga kini masih menjadi sistem ekonomi kuat di dunia.

Perbedaan ekonomi baru dengan ekonomi lama (sebelumnya) pada dasarnya lebih pada paradigma dalam melaksanakan atau mengelola dan mengembangkan aktifitas ekonomi. Ekonomi baru sangat sarat dengan dinamika perubahan yang cepat, aktifitas yang

9 Jan Pronk, "Globalization: A Developmental Approach", dalam Jan Nederveen Pieterse (ed.), *Global Futures, Shaping Globalization* (London: Zed Books, 2001), 43.

10 Walter Leimgruber, *Between Global and Local, Aldershot* (England: Ashgate Publishing Limited, 2004), 18.

11 Abdul Rashid Moten, "Modenization and The Process of Globalization: The Muslim Experience and Responses", dalam K.S. Nathan dan Mohammad Hashim Kamali (ed.), *Islam in Southeast Asia: Political, Social and Strategic Challenges for the 21st Century* (Singapura: Institute of Southeast Asian Studies, 2005), 231.

12 Collin Rose dan Malcolm J. Nicholl, *Accelerated Learning for the 21 st Century*. (New York: Delacorte Press, 1997), 1.

13 Paul R Gregory dan Robert C Stuart, *Comparative Economic System* (Boston: Houghton Mifflin Company, 1981), 16.

seolah tanpa batas (*borderless*), dan jaringan yang menjadi pola hubungan keseharian yang menentukan bagaimana proses nilai tambah dilakukan, serta bagaimana keterkaitan dan daya saing dibangun dan dipertahankan. Terlebih penting lagi sebenarnya adalah bahwa pengetahuan (*knowledge*) dan inovasi dianggap sebagai pendorong utama (*the driving force*) bagi ekonomi baru. Kenyataan ini memang untuk sementara ini lebih signifikan terjadi di negara ekonomi maju.

Senapas dengan ekonomi baru, berkembang jargon lain yaitu ekonomi pengetahuan atau ekonomi berbasis pengetahuan. Ekonomi pengetahuan (*knowledge economy*) merupakan suatu ekonomi yang membuat penggunaan pengetahuan secara efektif untuk pembangunan ekonomi dan sosial. Ini mencakup *tapping* pengetahuan asing, adaptasi dan menciptakan pengetahuan untuk kebutuhan-kebutuhan spesifik (*World Bank Institute*). Dalam definisi yang lain, ekonomi berbasis pengetahuan (*knowledge-based economy*/KBE) pada dasarnya merupakan ekonomi dimana penciptaan (produksi), penyebaran (distribusi) dan pemanfaatan/pendayagunaan ilmu pengetahuan menjadi penggerak utama pertumbuhan, pengembangan kesejahteraan, dan penciptaan/perluasan lapangan kerja di semua industri/sector ekonomi.

KAGAGALAN EKONOMI KAPITALIS DAN LAHIRNYA MAZHAB POSITIF EKONOMI GLOBAL

Kegagalan ilmu ekonomi (kapitalisme dan variannya) dalam menyelesaikan tugas untuk memberikan kontribusi terhadap usaha perwujudan tujuan-tujuan kemanusiaan telah banyak menghadapi gugatan. Bahaya kegagalan tersebut sudah dirasakan oleh para ekonom sepanjang sejarah ilmu ekonomi konvensional, sebagaimana yang telah disampaikan oleh ekonom, seperti Sismondi (1773-1842), Carlyle (1795-1881), Ruskin (1819-1900), Hobson (1858-1940), Tawney (1880-1962), Schumacher (1891-1971) dan Boulding (1910-1993).¹⁴

Variasi terbaru dari ilmu ekonomi pasca kegagalan sistem ekonomi sosialis dan kapitalisme *laissez-faire* adalah *welfare economics* (ilmu ekonomi kesejahteraan). Ketika *welfare economics* pertama kali

14 Hutchinson, T.W., *Positive Economics and Policy Judgement* (London: Alien & Unwin, 1964); Gunnar Myrdal, *Objectivity in Social Research* (London: Gerald Duckworth, 1970); Robert L. Heilbroner, *Economics as a 'Value-Free' Science* (*Social Research*, 1973), 129.

dikembangkan pada tahun 1930-an, hal ini membangkitkan harapan yang besar. Penggunaan kalimat ‘*welfare*’ sebelum kalimat *economics* memberikan kesan bahwa ilmu ekonomi ini secara eksplisit mulai bersifat normatif, menjurus kepada bentuk kesejahteraan yang diinginkan semua orang, serta akan merekomendasikan kebijakan-kebijakan bagi aktualisasi kesejahteraan manusia. Namun, harapan tersebut ternyata terbukti salah tempat. *Welfare economics* tidak mampu untuk melepaskan diri dari perangkat ilmu ekonomi konvensional lainnya. Kesejahteraan ternyata hanya didefinisikan dalam bentuk keinginan-keinginan individu yang mementingkan kepentingan pribadi yang tidak memberi ruang kepada altruisme atau kepentingan kemanusiaan demi kesejahteraan semua manusia. Bahkan ia mengarah menjadi *wertfreiheit* atau bebas dari pertimbangan nilai sebagaimana mitra ‘ilmu ekonomi positif-nya’. Sejumlah ekonom juga telah berusaha menyerang pendekatan *wertfreiheit* dalam *welfare economics*.¹⁵

Banyak contoh negara yang mencoba menerapkan *welfare economics* dengan berbagai versinya. Negara-negara tersebut disebut *welfare state* (negara kesejahteraan), mulai dari versi yang setengah-setengah, seperti Amerika Serikat, sampai pada bentuknya yang lebih kongkrit seperti di Swedia. Secara sederhana, negara kesejahteraan didefinisikan, “*is a state which provides all individuals a fair distribution of the basic resources necessary to maintain a good standard of living*”.¹⁶ Tujuan pokok negara kesejahteraan antara lain mengontrol dan mendayagunakan sumber daya sosial ekonomi untuk kepentingan publik; menjamin distribusi kekayaan secara adil dan merata; mengurangi kemiskinan; menyediakan asuransi sosial (pendidikan, kesehatan) bagi masyarakat miskin; menyediakan subsidi untuk layanan sosial dasar bagi *disadvantaged people*; memberi proteksi sosial bagi setiap warga.

Kegagalan ilmu konvensional kapitalis dalam menciptakan keadilan sosial dan menyelesaikan persoalan manusia sudah tidak terbantah.¹⁷ Secara internasional, hal itu dapat disimak melalui buku *The Death of Economics* karya Ormerod, atau melalui buku *Economics as Religion* karya Nelson. Sedangkan secara nasional, hal itu dapat

15 M. Umar Chapra, *The Future of Economics; an Islamic Perspective*, Edisi terjemah (Jakarta: SEBI, 2001), 45.

16 Amich Alhumami, “Negara Kesejahteraan”, *Kompas*, 17, Oktober, 2005, 15.

17 Khursid Ahmad, “The Future of Economics: An Islamic Perspective”, *New York Times*, 28 November 1993, 19.

disimak melalui buku *Ekspose Ekonomik* karya Sri-Edi Swasono. Sesuatu yang menggembirakan adalah telah terjadi perkembangan yang positif dalam ilmu ekonomi, dimana banyak pakar ekonomi telah melakukan kritik tajam terhadap kegagalan ilmu ekonomi konvensional kapitalis dan menyumbangkan pemikirannya dengan mengemukakan ide-ide yang mengarah kepada perbaikan paradigma ilmu ekonomi menuju yang lebih baik, yaitu perhatian terhadap nilai-nilai moral, etik, dan keadilan sosial. Misalnya dikemukakan oleh Thomas Friedman ketika diadakan konferensi Davos, Agustus 1997, yang menghimpun para pemimpin dari seluruh dunia. Ia mengatakan yang artinya: “Serangan terhadap mereka yang akan membangun dunia pada basis satu dimensi, dimana perdagangan adalah segalanya, dimana hanya perhitungan-perhitungan finansial saja yang perlu, dengan mudah akan menemui serangan moral potensial terhadap globalisasi”.¹⁸

MUNCULNYA BEBERAPA PARADIGMA BARU EKONOMI

Edward E. Zajac, dalam buku *Political Economy of Fairness*, menjelaskan beberapa teori keadilan ekonomi, baik yang bersifat normatif maupun positif ekonomi, seperti *John Rawls' Theory of Justice*, *Robert Nozick Theory of superfairness* (normatif) dan *Perceived Economic Justice in Public Utility Regulation* (positif) dan sebagainya. Perbincangan dalam buku ini selalu mengaitkan antara makro dan mikro ekonomi, karena sumber persoalan moral dalam ekonomi, di antaranya karena tidak mesranya *link* antara makro dan mikro ekonomi. Ini seperti telah banyak dikritik tentang pembagian makro dan mikro itu tidak tuntas.¹⁹

Kesulitan yang dihadapi oleh ilmu ekonomi konvensional telah diuji oleh sejumlah pakar ekonomi terkemuka dalam suatu kajian, *Economics in The Future: Towards a New Paradigm*.²⁰ Konsensus yang muncul dari buku ini adalah bahwa yang diperlukan untuk menyelamatkan ilmu ekonomi dari krisis yang sedang dialaminya,

18 Khursid Ahmad dalam “Kata Pengantar” buku Umer Chapra, *The Future of Economics: An Islamic Perspective*. Khursid Ahmad (2001), “Kata Pengantar” dalam Umer Chapra, *Masa Depan Ilmu Ekonomi: Sebuah Tinjauan Islam*. terj. Ikhwan Abidin Basri (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), xvii.

19 Edward E. Zajac, *Political Economy of Fairness* (London: MIT Press. 1995), 34.

20 Khursid Ahmad dalam “Kata Pengantar” buku Umer Chapra, *The Future of Economics: An Islamic Perspective*, xix.

bukanlah dengan melakukan penafsiran teori ini atau teori itu atau melakukan perubahan-perubahan dalam paradigma ilmu ekonomi, tetapi yang diperlukan adalah mengubah paradigma itu sendiri dan bergerak menuju paradigma baru dimana problem-problem ekonomi tidak dikaji secara terpisah, tetapi dikaji dalam konteks keseluruhan sistem sosial, dimana ide-ide, visi masyarakat, dan nilai-nilai moral tidak disembunyikan, tetapi mendapatkan tempat dalam parameter yang mempengaruhi proses pembuatan keputusan ekonomi.²¹

Hal ini kemudian mendorong berkembangnya beberapa aliran pemikiran yang berbeda (*alternative thought*) dari pandangan mainstream. Beberapa aliran pemikiran ilmu ekonomi alternatif (*alternative economics*) tersebut adalah:²² Pertama, *Grant Economics* yang berpendapat bahwa tingkah laku altruistik bukan merupakan sebuah penyelewengan dari rasionalitas. Pandangan ini juga memberikan argumen bahwa mempersamakan tingkah laku rasional dengan hanya tingkah laku mementingkan diri pribadi adalah tidak realistis. Perintis konsep ini mengkritik ilmu ekonomi bebas nilai, yang mengabaikan bakat manusia dalam jangkauan analisis ekonominya.

Kedua adalah Ekonomi Humanistik (*Humanistic Economics*) yang mempromosikan kesejahteraan manusia lewat cara pengakuan dan penyatuan seluruh susunan nilai-nilai dasar manusia. Penganut ilmu ekonomi ini mengkritik asas psikologi klasik kemanfaatan (*utility*) yang banyak mempengaruhi ilmu ekonomi. Asas psikologi tersebut lebih menekankan kepada nafsu dan kekayaan, sedangkan ekonomi humanistik lebih berkiblat kepada psikologi humanistik yang lebih menekankan kepada kebutuhan kepuasan dan perkembangan manusia. *Ketiga*, Ekonomi Sosial (*Social Economics*) yang mencakup reformulasi bentuk teori ekonomi dengan pertimbangan-pertimbangan etika. Komitmen kepada pentingnya kenetralan nilai, sebagai kesucian cita-cita pencerahan ilmu yang telah diwariskan oleh ekonom masa pencerahan Barat, tidak bisa dipertahankan (*untenable*) dan tidak disukai yang secara diam-diam juga mencakup pertimbangan nilai. Tidak disukai karena penelitian ilmiah tidak mampu menolak pertanyaan-pertanyaan yang menyangkut tujuan publik dan prioritas sosial dalam alokasi sumber daya (*resources allocation*).

21 Peter Koslowski, *The Good and The Economical, Ethical Choice in Economics and Management* (London: Springer-Verlag), 4.

22 Chapra, *Masa Depan*, 49.

PERILAKU EKONOMI YANG DIHARAPKAN

Pada konsepsi Islam, perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhan seharusnya berpijak pada landasan-landasan syari'ah. Selain itu, juga mempertimbangkan kecenderungan-kecenderungan dari fitrah manusia. Kemudian pada ekonomi Islam, keduanya berinteraksi secara harmonis sehingga terbentuklah sebuah mekanisme ekonomi yang khas dengan pondasi nilai-nilai Ilahiyah. Disisi lain, ekonomi konvensional mendefinisikan dirinya sebagai segala tingkah laku manusia dalam memenuhi kebutuhannya yang tak terbatas dengan menggunakan faktor-faktor produksi yang terbatas. Dari definisi ini, terdapat dua makna penting; *pertama*, definisi ini menyiratkan perilaku manusia tersebut terfokus sebagai perilaku yang bersifat individual. *Kedua*, bahwa tingkah laku manusia itu bukan dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan (*needs*), tetapi pada hakekatnya untuk memuaskan keinginan (*wants*) yang memang tak terbatas.²³

Ada perbedaan yang mendasar antara ekonomi Islam dan ekonomi konvensional dari pondasi dasar yang telah dijelaskan diatas. *Pertama* adalah sumber landasan nilai yang muncul. M.N. Siddiqi²⁴ mengemukakan bahwa sumber utama dari perilaku dan infrastruktur ekonomi Islam adalah al-Qur'an dan as-Sunnah. Pengetahuan itu bukan buah fikiran pakar ekonomi Islam, tapi 'ide langsung' dari Allah Swt. Sementara itu, sumber pengetahuan dari perilaku dan institusi ekonomi konvensional adalah intelegensi dan intuisi akal manusia melalui studi empiris. Perbedaan kedua, tentu saja terletak pada motif perilaku itu sendiri. Ekonomi Islam dibangun dan dikembangkan di atas nilai altruisme, sedangkan ekonomi konvensional dibangun dan dikembangkan berdasarkan nilai egoisme. Dari banyak prinsip-prinsip ekonomi Islam yang disebutkan oleh pakar ekonomi Islam, setidaknya terdapat empat prinsip utama dalam sistem ekonomi Islam.²⁵ *Pertama*, menjalankan usaha-usaha yang halal (*permissible conduct*). Semua aspek, mulai dari produk, manajemen, proses produksi hingga proses sirkulasi atau distribusi, haruslah dalam kerangka halal.

23 Ali Sakti, *Pengantar Ekonomi Islam* (Jakarta: Modul Kuliah STEI SEBI, 2003), 16.

24 Muhammad Najatullah Siddiqi, "Islamizing Economics Toward Islamization of Disciplines", The International Institute of Islamic Thought (IIIT), (USA: Herndon, Virginia, 1995), 255.

25 Sakti, *Pengantar*, 20.

Usaha-usaha tersebut tidak bersentuhan dengan judi (*maisir*) dan spekulasi (*gharar*) atau tindakan-tindakan lainnya yang dilarang secara syariah. Hal ini juga berlandaskan pada surah al-Baqarah ayat 72 & 168 serta al-Nisa' ayat 29. Dalam ekonomi Islam pada dasarnya aktifitas apapun hukumnya boleh kecuali ada dalil yang melarang aktifitas itu secara syariah. *Kedua*, hidup hemat dan tidak bermewah-mewah (*abstain from wasteful and luxurius living*), bermakna juga bahwa tindakan-tindakan ekonomi hanyalah sekedar untuk memenuhi kebutuhan (*needs*) bukan memuaskan keinginan (*wants*). Prinsip ini sejalan dengan panduan al-Qur'an dalam surah al-A'rāf: 31-32 dan al-Isrā': 29. *Ketiga*, implementasi Zakat (*implementation of zakat*).

Pada tingkat negara, mekanisme zakat yang diharapkan adalah *obligatory zakat system* bukan *voluntary zakat system*. Disamping itu, ada juga instrumen sejenis yang bersifat sukarela (*voluntary*), yaitu infak, shadaqah, wakaf, dan hadiah yang terimplementasi dalam bangunan sosial masyarakat. Prinsip ini sebagaimana diisyaratkan dalam surah al-Taubah: 60 dan 103. *Keempat*, penghapusan/pelarangan riba atau bunga (*prohibition of riba*), *Gharar* dan *Maisir*.

Untuk itu perlu menjadikan sistem bagi hasil (*profit-loss sharing*) dengan instrumen *mudharabah* dan *musyarakah* sebagai pengganti sistem kredit (*credit system*) berikut instrumen bunganya (*interest rate*) dan membersihkan ekonomi dari segala perilaku buruk yang merusak sistem, seperti perilaku menipu, spekulasi atau judi. Sedangkan dari perspektif konvensional, harta merupakan kekayaan yang menjadi hak milik pribadi seseorang. Islam cenderung melihat harta berdasarkan *flow concept*, yang sebaiknya mengalir. Sedangkan ekonomi konvensional cenderung memandangnya berdasarkan *stock concept*, yang mendorong perilaku penumpukan dan penimbunan.²⁶

PELUANG DAN TANTANGAN PENGEMBANGAN EKONOMI ISLAM

Keberadaan sistem ekonomi Islam merupakan konsekuensi dari pandangan hidup Islam (*Islamic worldview*). *Worldview* Islam yang menjadi dasar ini oleh para ulama dan cendekiawan muslim disebut dengan berbagai istilah; Maulana al-Maududi mengistilahkan

²⁶ Adiwarman Azwar Karim, *Ekonomi Islam: Suatu Kajian Ekonomi Makro* (Indonesia: The International Institute of Islamic Thought Indonesia, 2002), 22.

kannya dengan *al-Nazāriat al-Islāmi (Islamic Vision)*, Sayyid Qutb menggunakan istilah *al-Taṣawwur al-Islāmi (Islamic Vision)*, Mohammad Atif al-Zayn menyebutnya *al-Mabda' al-Islāmī (Islamic Principle)*, sedangkan Syed Naquib al-Attas menamakannya *Ru'yat al-Islām li al-Wujūd (Islamic Worldview)*. Meskipun secara istilah terjadi perbedaan penyebutan, tetapi secara esensi terdapat kesamaan keyakinan para Ulama' dan Cendekiawan tersebut bahwa pandangan hidup (*worldview*) seorang muslim haruslah menjadikan Islam sebagai sistem hidup yang mengatur semua sisi kehidupan manusia, yang menjanjikan kesejahteraan dan keselamatan dunia dan akhirat. *Worldview* ini lahir dari adanya konsep-konsep Islam yang meng-kristal menjadi kerangka berpikir (*mental framework*).

Dalam aplikasinya, perkembangan sistem Ekonomi Islam ditandai dengan banyaknya lembaga-lembaga keuangan Syariah yang didirikan seperti Perbankan Syariah, *Bait al-Māl wa al-Tamwīl*, Pasar Modal Syariah, Reksadana Syariah, Pegadaian Syariah, Asuransi Syariah dan lembaga-lembaga lain yang dijalankan dengan prinsip-prinsip Syariah. Semakin banyak lembaga-lembaga keuangan yang berasaskan prinsip-prinsip dasar Syariah, semakin memberikan alternatif yang lebih besar kepada masyarakat untuk menggunakan lembaga keuangan yang tidak berdasarkan sistem bunga (lembaga keuangan konvensional).

Di pihak pemerintah, pengembangan Ekonomi Islam bisa dipacu dengan membuat undang-undang yang digunakan sebagai landasan formal dalam menjalankan kegiatan bisnis berdasarkan sistem Ekonomi Islam. Misalnya momentum dan fakta keunggulan bank Syariah dibanding bank konvensional di Indonesia pada akhir 2006. Akhir 2006 memberikan catatan fantastik tentang keunggulan sistem perbankan Islam yang merupakan salah satu aspek penting Syariat Islam dalam bidang ekonomi di banding perbankan konvensional. Hal ini terlihat dari perbandingan beberapa aspek performance operasi sistem perbankan meliputi *Non Performing Loan/Financing (NPL/NPF)*, *Financing/Loan to Deposits Ratio (FDR/LDR)*, simpanan bank di SBI atau SWBI, dan kinerjanya dalam menggerakkan sektor riil. Kenyataan ini mestinya bisa menjadi landasan bagi pemerintah untuk membuat regulasi yang menjadikan bank Syariah lebih dapat berkembang. Selain itu, fakta tersebut juga mestinya bisa "membuka" mata dan hati semua masyarakat muslim Indonesia khususnya dan masyarakat Indonesia

secara keseluruhan untuk lebih bersungguh-sungguh menerapkan Syariat Islam dalam bidang ekonomi secara keseluruhan, karena bukti empiris tentang keunggulannya, khususnya dalam aspek perbankan, sudah tidak terbantah lagi.²⁷

Di samping pengembangan konsep, strategi pengembangan Ekonomi Islam tidak terlepas dari pengembangan lembaga-lembaga ekonomi Syariah yang akan menjalankan kegiatan bisnis tersebut sesuai dengan prinsip ekonomi Syariah. Strategi pengembangan lembaga Ekonomi Islam ditujukan untuk mengoptimalkan peran lembaga ini sebagai perantara (*intermediary*) antara pemilik dana (kreditur) dengan pihak yang memerlukan dana (debitur) dengan mengedepankan prinsip syariah.

Tantangan yang dihadapi dalam pengembangan ekonomi Islam, di antaranya adalah belum banyaknya lembaga *funding* yang menyediakan dana riset maupun beasiswa bagi mahasiswa ekonomi Islam.²⁸ Oleh karena itu, perlu ada upaya yang lebih terarah dan sistematis serta kreatif untuk menggali sumber-sumber dana alternatif agar dapat memenuhi kebutuhan untuk mendanai pengembangan ekonomi Islam. Salah satu alternatifnya misalnya dengan memberdayakan institusi waqaf, zakat, infaq dan sedekah sebagai media pengumpulan *charitable fund* untuk kepentingan agama.

Abbas Mirakhor mengusulkan agar pendekatan dalam pengkajian ekonomi Islam juga menggunakan pendekatan hermeneutik. Pendekatan ini berbeda dengan tafsir, karena sifat hermeneutik adalah *the process of extracting economic meaning from the first order interpretation*.²⁹ Dengan pendekatan ini diperkirakan ekonomi Islam ke depan akan kaya dengan teori-teori ekonomi yang betul-betul berbasis al-Quran dan Sunnah.

Di antara tantangan lain yang dihadapi dalam pengembangan ekonomi Islam di Indoensia adalah kurangnya pemahaman masyarakat terhadap sistem keuangan dan perbankan syariah. Hal tersebut terlihat dari belum banyaknya masyarakat yang mengakses layanan perbankan syariah dibandingkan layanan perbankan konvensional. Untuk itu diperlukan strategi sosialisasi yang lebih

27 A Riawan Amin, "Reorientasi Kebijakan Perbankan", *Republika*, 4 Desember 2006,7

28 Abbas Mirakhor, *A Note on Islamic Economics* (Jeddah: Islamic Research and Training Institute 2007), 23.

29 *Ibid.*, 18.

jitu kepada masyarakat. Bahkan kalau perlu diberlakukan bulan kampanye ekonomi Islam di masyarakat. Hal ini misalnya ditempuh dengan cara membangun kesepakatan semua takmir masjid di Indonesia untuk secara serentak tema khutbah jumat pada bulan tertentu adalah khusus bicara tentang ekonomi Islam.

PENUTUP

Dengan demikian, *economic rationality from Islamic view* bermakna: (1) konsisten dalam pilihan ekonomi (2) *Content* pilihan tidak mengandung haram, *isrāf*, *tabdhīr*, mudarat kepada masyarakat (jadi senantiasa taat kepada *rules* Allah) (3) Memperhatikan faktor eksternal seperti kebaikan hati (*altruism*) yang sesungguhnya, interaksi sosial yang mesra.

Berdasarkan uraian di atas, jelaslah perbedaan mendasar antara ekonomi Islam dan ekonomi konvensional. Di antara perbedaan mendasar itu adalah:

1. Rasionalitas dalam ekonomi konvensional adalah *rational economics man*, yaitu tindakan individu dianggap rasional jika tertumpu kepada kepentingan diri sendiri (*self interest*) yang menjadi satu-satunya tujuan bagi seluruh aktivitas. Ekonomi konvensional mengabaikan moral dan etika dalam pembelanjaan dan unsur waktu adalah terbatas hanya di dunia saja tanpa memperhatikan hari akhirat. Sedangkan dalam ekonomi Islam jenis manusia yang hendak dibentuk adalah *Islamic man* (*‘Ibād al-Rahmān*), (QS. al-Furqān: 63). *Islamic man* dianggap perilakunya rasional jika konsisten dengan prinsip-prinsip Islam yang bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang seimbang.
2. Sumber utama ekonomi Islam adalah al-Qur’an dan al-Sunnah atau ajaran Islam. Segala sesuatu yang bertentangan dengan dua sumber tersebut harus dikalahkan oleh aturan kedua sumber tersebut. Berbeda dengan ekonomi konvensional yang berdasarkan pada hal-hal yang bersifat positivistik.
3. Islam lebih menekankan pada konsep *need* daripada *want* dalam menuju masalah, karena *need* lebih bisa diukur daripada *want*. Menurut Islam, manusia mesti mengendalikan dan mengarahkan *want* dan *need* sehingga dapat membawa *masalah* dan bukan madarat untuk kehidupan dunia dan akhirat.

4. Orientasi dari keseimbangan konsumen dan produsen dalam ekonomi konvensional adalah untuk semata-mata mengutamakan keuntungan. Semua tindakan ekonominya diarahkan untuk mendapatkan keuntungan yang maksimal. Jika tidak demikian justru dianggap tidak rasional. Lain halnya dengan ekonomi Islam yang tidak hanya ingin mencapai keuntungan ekonomi, tetapi juga mengharapkan keuntungan ruhani dan *al-falāḥ*.

DAFTAR RUJUKAN

- Ahmad, Khursid. dalam "Kata Pengantar" dalam Umer Chapra. *Masa Depan Ilmu Ekonomi: Sebuah Tinjauan Islam*. Terj. Ikhwan Abidin Basri. Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Alhumami, Amich. "Negara Kesejahteraan", *Kompas*, 17, Oktober, 2005.
- Amin, A Riawan. "Reorientasi Kebijakan Perbankan", *Republika*, 4 Desember 2006.
- Badan Pusat Statistik Indonesia. *Indonesia dalam Angka 2009*. Jakarta: Lembaga BPS, 2009.
- Chapra, M. Umar. *The Future of Economics; an Islamic Perspective*. terj. Danah Zohar dan Ian Marshal. Jakarta: SEBI, 2001.
- Dodge, Bayard. "The Subjects and Titles of Book Written During the First Four Centuries of Islam." *Islamic Culture*. Oktober, 1954.
- Gregory, Paul R dan Robert C Stuart. *Comparative Economic System*. Boston: Houghton Mifflin Company, 1981.
- Heilbroner, Robert L. "Economics as a 'Value-Free' Science". *Social Research*, 1973.
- Hutchinson, T.W. *Positive Economics and Policy Judgmetnet*. London: Alien & Unwin, 1964.
- Karim, Adiwarmman Azwar. *Ekonomi Islam: Suatu Kajian Ekonomi Makro*. Indonesia: The International Institute of Islamic Thought Indonesia, 2002.
- Koslowski, Peter. *The Good and The Economical, Ethical Choice in Economics and Management*. London: Springer-Verlag.

- Leimgruber, Walter. *Between Global and Local, Aldershot*. England: Ashgate Publishing Limited, 2004.
- Manzoor, S. Parvez. "Islam in the Era of Globalization: Muslim Attitudes Towards Modernity and Identity" oleh Johan Meuleman (ed.). 2002. London: Routledge Curzon, dimuat dalam *Journal of Islamic Studies*, Vol. 15, No. 2, Mei 2004, Oxford: Oxford Centre for Islamic Studies.
- Mirakhor, Abbas. *A Note on Islamic Economics*. Jeddah: Islamic Research and Training Institute 2007.
- Moten, Abdul Rashid. "Modenization and The Process of Globalization: The Muslim Experience and Responses", dalam K.S. Nathan dan Mohammad Hashim Kamali (ed.), *Islam in Southeast Asia: Political, Social and Strategic Challenges for the 21st Century*. Singapura: Institute of Southeast Asian Studies, 2005.
- Myrdal, Gunnar. *Objectivity in Social Research*. London: Gerald Duckworth, 1970.
- Pronk, Jan. "Globalization: A Developmental Approach", dalam Jan Nederveen Pieterse (ed.), *Global Futures, Shaping Globalization*. London: Zed Books, 2001.
- Rose, Collin dan Malcolm J. Nicholl. *Accelerated Learning for the 21st Century*. New York: Delacorte Press, 1997.
- Sakti, Ali. *Pengantar Ekonomi Islam*. Jakarta: Modul Kuliah STEI SEBI, 2003.
- Siddiqi, Muhammad Najatullah. *Islamizing Economics Toward Islamization of Disciplines*. USA: The International Institute of Islamic Thought (IIIT) Herndon, Virginia, 1995.
- Suharto, Edi. *Analisis Kebijakan Publik: Panduan Praktis Mengkaji Masalah dan Kebijakan Sosial*. Bandung: Alfabeta, 2005.
- Sulayman, Abdul Hamid Abu. "Islamization of Knowledge with Special Reference to Political Science," dalam *American Journal of Islamic social Sciences*, Vol. 2 (ed) (Nort America: Association of muslim scientis, 1985).

The United Nations Human Development Report. *Does Globalization Help The Poor?* terj. Widyasmara dan AB Widyanta. Yogyakarta: Cindelas Pustaka Rakyat Cerdas, 2003.

Zajac, Edward E. *Political Economy of Fairness*. London: MIT Press. 1995.